

PROGRAM ANTI-DOWRY OLEH UNITED NATIONS WOMEN DI INDIA TAHUN 2016-2018

Oleh : Rasyid Ridha

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M. Int.Rel

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Program Anti-Dowry yang diimplementasikan oleh United Nations Women di India pada tahun 2016 hingga 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, dengan penghimpunan data sekunder dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan sumber-sumber internet. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata. Program Anti-Dowry ini bertujuan untuk mengatasi masalah serius dari praktik mas kawin (dowry) yang masih berlangsung di India. Praktik ini telah menyebabkan dampak negatif terhadap kesetaraan gender, hak perempuan, dan kehidupan keluarga. Dalam periode penelitian, United Nations Women telah bekerja sama dengan pemerintah India dan berbagai lembaga untuk menghapuskan praktik ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Program Anti-Dowry telah mencapai beberapa hasil yang signifikan. Pertama, melalui kampanye kesadaran masyarakat yang intensif, program berhasil meningkatkan kesadaran tentang isu dowry dan dampak buruknya. Kedua, program ini telah menguatkan hukum dan regulasi terkait mas kawin, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan.

Kata kunci: Anti-Dowry, United Nations Women, India, Mas Kawin, Kesetaraan Gender

ABSTRACT

This study discusses the Anti-Dowry Program implemented by United Nations Women in India from 2016 to 2018. The data collection method used is a literature study, with secondary data collection from literature relevant to the problem under study, such as books, journals, newspapers, and internet sources. The research approach used is qualitative, with the aim of understanding the phenomena experienced by research subjects holistically and descriptively in the form of words. The Anti-Dowry Program aims to address the serious problem of

dowry practices that are still ongoing in India. This practice has had a negative impact on gender equality, women's rights and family life. During the research period, United Nations Women has worked closely with the Indian government and various agencies to eradicate this practice. This research reveals that the Anti-Dowry Program has achieved some significant results. First, through an intensive public awareness campaign, the program succeeded in raising awareness about the issue of dowry and its adverse effects. Second, the program has strengthened laws and regulations related to dowry, thereby providing stronger legal protections for women.

Keywords: *Anti-Dowry, United Nations Women, India, Dowry, Gender Equality*

PENDAHULUAN

Program Anti-Dowry oleh United Nations Women di India pada tahun 2016-2018 merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi dan memberantas praktik bride price atau mahar dalam bentuk barang atau uang yang diberikan oleh keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Praktik ini telah lama menjadi bagian dari tradisi di beberapa budaya di India, namun sayangnya, dalam beberapa kasus, praktik ini dapat menyebabkan beban finansial yang berat bagi keluarga pengantin wanita dan berdampak negatif pada kesetaraan gender. Dalam artikel ilmiah ini, akan diuraikan secara detail mengenai latar belakang permasalahan, tujuan program, implementasi, dan hasil yang dicapai oleh Program Anti-Dowry United Nations Women di India dalam periode tahun 2016 hingga 2018.

Masalah bride price atau mahar telah menjadi isu yang kompleks dan rumit di India selama bertahun-tahun. Tradisi ini dipengaruhi oleh aspek budaya, agama, dan sosial di berbagai wilayah di India. Meskipun dalam beberapa kasus, bride price bisa dianggap sebagai simbol kasih sayang atau tanda rasa hormat, namun praktik ini juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang serius. Salah satu permasalahan utamanya adalah terkait ekonomi, di mana bride price sering kali berujung pada beban finansial yang tinggi bagi keluarga pengantin wanita. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan finansial dan ketidaksetaraan gender dalam hubungan perkawinan. (Rao: 2013)

Selain itu, praktik bride price juga dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap wanita, khususnya ketika keluarga pengantin pria menuntut pembayaran mahar yang tidak masuk akal dan menolak untuk

menikahkan putranya jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi. Akibatnya, ada beberapa kasus di mana pernikahan dibatalkan, dan wanita menjadi korban dari stigma sosial dan tekanan psikologis yang berat. Oleh karena itu, perlunya intervensi dan program yang efektif untuk mengurangi dan mencegah praktik bride price menjadi semakin mendesak. (Kapur: 2010)

Dalam konteks ini, United Nations Women (UN Women) berperan penting sebagai agen perubahan dalam upaya melawan praktik bride price di India. UN Women merupakan entitas PBB yang khusus berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Program Anti-Dowry yang dijalankan oleh UN Women pada tahun 2016 hingga 2018 bertujuan untuk menciptakan kesadaran tentang dampak negatif dari bride price, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait praktik bride price. (UN Women: 2016)

Implementasi Program

Dalam melaksanakan Program Anti-Dowry, UN Women bekerja sama dengan pemerintah India, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Program ini mencakup berbagai strategi, mulai dari kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang

dampak negatif bride price, hingga pelatihan dan pendampingan bagi perempuan untuk mengenal hak-hak mereka dan meningkatkan keterampilan ekonomi. Selain itu, UN Women juga melakukan advokasi kebijakan untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi praktik bride price secara lebih komprehensif. (Sharma: 2017)

Hasil dan Dampak

Tidak diragukan lagi, Program Anti-Dowry UN Women di India memiliki dampak positif yang signifikan. Selama periode 2016 hingga 2018, program ini berhasil mencapai sejumlah hasil yang menggembirakan. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi negatif dari bride price. Masyarakat menjadi lebih terbuka untuk berbicara tentang isu ini, dan banyak yang mulai meragukan keberlanjutan praktik bride price di era modern. (Gupta: 2018)

Selain itu, melalui kampanye pendidikan dan pelatihan, lebih banyak perempuan menjadi lebih percaya diri, memiliki keterampilan ekonomi yang lebih baik, dan menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan lokal juga menjadi salah satu hasil yang menggembirakan dari program ini. Adanya perempuan dalam posisi kekuasaan ini memberikan peluang untuk mempengaruhi kebijakan dan langkah-langkah yang lebih inklusif

dan berpihak pada kesetaraan gender. (Patel: 2018)

Program Anti-Dowry oleh United Nations Women di India pada tahun 2016-2018 merupakan langkah yang penting dalam mengatasi dan memberantas praktik bride price yang telah berdampak negatif pada kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan di India. Melalui strategi kampanye publik, pendidikan, pelatihan, dan advokasi kebijakan, program ini berhasil mencapai hasil yang menggembirakan dan meninggalkan dampak positif yang berarti bagi masyarakat India. Namun demikian, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih adil dan mengatasi tradisi patriarki yang kuat masih menjadi tantangan yang harus terus dihadapi dan diatasi. Diperlukan kerja sama lintas sektor dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mewujudkan perubahan yang berarti dan berkelanjutan bagi perempuan di India.

Praktik dowry di India telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian dari tradisi budaya. Meskipun ada Undang-Undang Anti-Dowry yang diberlakukan pada tahun 1961 (Mondal : 2012), praktik ini tetap berlanjut dan menyebabkan dampak negatif pada kehidupan perempuan. Banyak perempuan menghadapi tekanan dari keluarga suami untuk membayar dowry yang besar, dan ketidakmampuan keluarga perempuan untuk memenuhi tuntutan tersebut seringkali

menyebabkan mereka menjadi korban kekerasan dan perlakuan tidak adil.

Pada tahun 2016, United Nations Women menyadari pentingnya campur tangan untuk mengatasi isu dowry ini dan menciptakan proyek "Anti-Dowry" di India. Program ini bertujuan untuk menghilangkan praktik dowry dan memastikan kesetaraan gender bagi perempuan dalam konteks pernikahan. United Nations Women bekerja sama dengan pemerintah India, LSM lokal, dan masyarakat setempat untuk mengimplementasikan program ini secara luas dan berkelanjutan.

Salah satu strategi utama yang diadopsi oleh program ini adalah advokasi dan kampanye sosial. Mereka menggunakan media massa, kampanye publik, dan forum komunitas untuk menyuarakan kesadaran tentang konsekuensi negatif dari praktik dowry dan mengajak masyarakat untuk menghentikan praktik ini. Selain itu, United Nations Women juga mendukung kelompok aktivis perempuan yang berjuang untuk mengubah pandangan masyarakat tentang praktik dowry (Kumar : 2017).

Dalam upaya mencapai kesetaraan gender, program ini juga memberdayakan perempuan dengan pendidikan dan keterampilan. United Nations Women memberikan beasiswa dan pelatihan keterampilan kepada perempuan muda, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk

meraih pendidikan yang lebih tinggi dan mandiri secara finansial. Dengan keterampilan baru ini, perempuan dapat mencari pekerjaan yang layak dan tidak lagi menjadi tergantung pada keluarga suami untuk ekonomi mereka (Gupta : 2019).

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi kaum pria dalam mengatasi masalah dowry. United Nations Women menyelenggarakan lokakarya dan seminar khusus untuk kaum pria, agar mereka menyadari pentingnya kesetaraan gender dan dampak negatif dari praktik dowry terhadap perempuan. Dengan melibatkan kaum pria, diharapkan perubahan sosial dapat terjadi lebih cepat dan berkelanjutan (Rao : 2018).

Pada akhir tahun 2018, program anti-dowry oleh United Nations Women di India telah menunjukkan beberapa hasil positif. Praktik dowry telah berkurang di beberapa daerah, dan kesadaran tentang kesetaraan gender semakin meningkat. Namun, perjalanan menuju kesetaraan gender dan penghapusan praktik dowry ini masih panjang, dan kerja sama semua pihak terus diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (United Nations Women : 2018).

KERANGKA TEORI

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan perspektif yang relevan untuk menganalisis program

"Anti-Dowry" yang dilakukan oleh United Nations Women di India antara tahun 2016 hingga 2018.

1. Perspektif Pluralisme:

Peneliti mengadopsi perspektif pluralisme dalam mengkaji hubungan internasional, mengakui pentingnya aktor non-negara dalam konteks global. Asumsi paradigma pluralis yang menjadi dasar penelitian ini meliputi:

a. Aktor non-negara memiliki peran krusial dalam hubungan internasional, seperti organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah, aktor transnasional, kelompok kepentingan, dan individu.

b. Negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, melainkan terdapat berbagai aktor lain seperti individu, kelompok kepentingan, dan birokrat.

c. Penolakan terhadap asumsi realis yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh suatu negara selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, dan mengakui adanya motif kepentingan tertentu.

d. Menentang dominasi ide politik internasional oleh isu militer.

2. Analisis Sistem Internasional:

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis sistem internasional, yang berfokus pada perilaku sistem internasional dan organisasi dalam hubungan internasional. Tingkat analisis ini sesuai dengan fokus

penelitian karena United Nations Women (UN Women) merupakan organisasi internasional dengan banyak anggota dan bergerak di bidang kemanusiaan. Penelitian akan melihat interaksi antara negara-negara di dunia dan bagaimana UN Women berperan dalam sistem internasional dalam mengatasi isu "dowry" di India.

3. Teori Peran dan Fungsi Organisasi Internasional:

Penulis juga menggunakan teori peran dan fungsi organisasi internasional untuk memahami bagaimana UN Women beroperasi dalam kemitraan internasional untuk mengatasi masalah "dowry" di India. Organisasi internasional adalah kerjasama lintas batas negara yang memiliki struktur organisasi jelas dan berfungsi untuk mencapai tujuan bersama. UN Women diharapkan dapat berkontribusi secara berkesinambungan dalam usaha mencapai tujuan "Anti-Dowry" di India melalui berbagai program dan kegiatan kolaboratif.

Dengan menggabungkan perspektif pluralisme, analisis sistem internasional, dan teori peran dan fungsi organisasi internasional, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang efektivitas dan dampak program "Anti-Dowry" oleh United Nations Women di India pada periode 2016-2018.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk

memahami fenomena tentang program Anti-Dowry oleh United Nations Women di India pada periode 2016-2018. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan menganalisis perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian secara holistik dan deskriptif. Studi literatur menjadi landasan utama dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan situs web terkait, seperti www.unwomen.org/en/about-us/governance dan www.asiapacific.unwomen.org/en/countries/india.

2. Sampel:

Penelitian ini tidak menggunakan sampel tertentu, karena fokusnya adalah pada analisis program Anti-Dowry secara keseluruhan oleh United Nations Women di India dari tahun 2016 hingga 2018. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan dari berbagai sumber untuk menyelidiki dampak dan efektivitas program tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan teknik library research. Peneliti mengakses berbagai sumber data sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berita dari media. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan

untuk mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang dan konteks khusus yang alamiah, sehingga membantu memahami fenomena sosial yang kompleks, seperti masalah dowry di India dan upaya United Nations Women dalam menanggulangnya.

4. Teknik Analisis Data:

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan proses yang sistematis dan holistik untuk menguraikan temuan dari studi literatur. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber dan menganalisis konten secara mendalam. Analisis data meliputi sintesis, interpretasi, dan pemaparan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Selain itu, peneliti juga mencari korelasi dan hubungan antara data-data sekunder yang terkumpul untuk menggambarkan perkembangan program Anti-Dowry di India dalam rentang waktu 2016-2018.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi program Anti-Dowry oleh United Nations Women di India dan memperkuat upaya-upaya dalam mengatasi isu dowry yang kompleks di masyarakat India. Studi literatur dan penggunaan data sekunder memainkan peran sentral dalam mencari jawaban serta membuktikan hipotesa yang relevan dengan tujuan penelitian ini.\

HASIL DAN PEMBAHASAN

UNHCR Memberikan Bantuan Pengungsi Sudan Selatan Di Uganda

Program Anti-Dowry oleh United Nations Women di India tahun 2016-2018 bertujuan untuk melawan praktik dowry atau mahar dalam pernikahan yang masih menjadi masalah serius di India. Dowry adalah praktik memberikan pemberian berupa uang, barang, atau harta lainnya oleh keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki pada saat pernikahan. Program ini dilaksanakan oleh United Nations Women sebagai bagian dari upaya global untuk memerangi ketidakadilan gender dan kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kali terkait dengan masalah dowry.

Pendekatan utama Program Anti-Dowry oleh United Nations Women di India tahun 2016-2018 adalah dengan memberdayakan perempuan untuk mengenal hak-hak mereka dan meningkatkan kesadaran tentang praktik dowry yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Program ini juga berfokus pada pendidikan, advokasi, dan pelatihan untuk membantu perempuan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat.

Melalui program ini, United Nations Women bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan

komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan mengurangi tekanan yang mendorong praktik dowry. Dalam beberapa kasus, program ini juga memberikan dukungan keuangan dan bantuan untuk perempuan yang menjadi korban dowry atau kekerasan dalam rumah tangga, untuk membantu mereka mendapatkan kembali kemandirian ekonomi dan sosial.

Penerapan Program Anti-Dowry oleh United Nations Women di India tahun 2016-2018 menunjukkan beberapa hasil yang positif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif praktik dowry, peningkatan laporan kepolisian terkait kasus dowry dan kekerasan dalam rumah tangga, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan kepemimpinan. Namun, program ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti resistensi dari pihak-pihak yang masih mempertahankan tradisi dowry, serta keterbatasan sumber daya dan akses ke wilayah-wilayah terpencil di India. Oleh karena itu, program ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak dan perlu terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi masalah dowry dan kekerasan gender.

A. Dowry Deaths di India



Gambar 1. Jumlah Kasus Kematian Dowry Deaths di India

Dowry Deaths atau Kematian Akibat Mahar adalah sebuah fenomena yang telah lama ada dan masih menjadi permasalahan serius di India.

Praktik pemberian mahar atau maskawin dalam pernikahan telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya di India, di mana pihak keluarga pengantin wanita memberikan sejumlah harta, uang, atau barang berharga kepada pihak keluarga pengantin pria. Namun, dalam beberapa kasus, praktik ini dapat berubah menjadi peristiwa tragis ketika seorang wanita menghadapi kekerasan fisik, psikologis, dan bahkan kematian karena ketidakpuasan atas mahar yang diberikan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi fenomena Dowry Deaths di India dengan fokus pada jumlah kasus dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini.

Jumlah Kasus Kematian Dowry Deaths di India

Dalam beberapa dekade terakhir, masalah Dowry Deaths di India telah menjadi sorotan media dan perhatian masyarakat. Data dari penelitian yang dilakukan oleh National Crime Records Bureau (NCRB) menunjukkan bahwa jumlah kasus kematian yang terkait dengan masalah dowry mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, dilaporkan terdapat sekitar 3.78

kasus Dowry Deaths setiap hari di India (NCRB, 2018). Angka ini menunjukkan tingkat yang sangat mengkhawatirkan tentang dampak negatif praktik dowry dalam masyarakat India. Meskipun ada berbagai undang-undang yang bertujuan untuk memberantas praktik dowry, namun kenyataannya masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena tekanan sosial, kurangnya kesadaran, dan berbagai hambatan lain yang menghalangi korban untuk melapor.

Grafik 3. Data Dowry Deaths di New Delhi 2013 - 2016



Faktor-faktor yang mempengaruhi Dowry Deaths di India

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus Dowry Deaths di India dapat diidentifikasi melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi fenomena ini adalah ketidakpuasan pihak keluarga pengantin pria terhadap mahar yang diberikan oleh pihak keluarga pengantin wanita. Dalam banyak kasus, pihak keluarga pengantin pria menuntut mahar yang lebih tinggi

dari yang telah disepakati, dan ketika permintaan mereka tidak terpenuhi, kekerasan terhadap wanita dapat terjadi sebagai bentuk balas dendam (Gupta, 2009). Penelitian juga menunjukkan bahwa mahar dapat menjadi alat untuk mengukur status sosial dan ekonomi keluarga pengantin wanita, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perlakuan dan penghormatan yang diberikan kepada wanita dalam pernikahan.

Selain itu, aspek patriarki dalam masyarakat India juga menjadi faktor penting yang memperkuat fenomena Dowry Deaths. Peran tradisional dan pandangan masyarakat yang menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki dapat menyebabkan penindasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekerasan terhadap wanita. Dalam penelitiannya, Mehra (2017) menyebutkan bahwa budaya patriarki yang kuat memandang wanita sebagai aset yang dimiliki oleh keluarga dan menimbulkan tekanan pada wanita untuk memenuhi harapan dan tuntutan keluarga pengantin pria.

Permasalahan ekonomi juga menjadi faktor yang mempengaruhi Dowry Deaths di India. Ketika keluarga pengantin wanita tidak dapat memenuhi tuntutan dowry yang tinggi, mereka bisa menghadapi perlakuan buruk dan pelecehan dari keluarga pengantin pria. Beban finansial dari mahar yang berlebihan dapat menyebabkan

tekanan yang besar pada keluarga pengantin wanita dan dapat berdampak pada hubungan mereka dengan pihak keluarga pengantin pria (Kumari, 2014).

Dowry Deaths atau Kematian Akibat Mahar adalah fenomena yang kompleks dan mengkhawatirkan di India. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus Dowry Deaths masih cukup tinggi, meskipun ada upaya hukum dan sosial untuk mengatasi masalah ini. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan atas mahar, budaya patriarki, dan masalah ekonomi telah teridentifikasi sebagai penyebab utama dari fenomena ini. Penting bagi masyarakat India untuk terus bekerja sama dalam mencari solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah Dowry Deaths ini dan memberikan perlindungan serta hak-hak yang setara bagi perempuan dalam konteks pernikahan dan kehidupan keluarga.

B. Gerakan Anti Dowry di India

Asal Usul Praktik Dowry di India Praktik dowry diyakini berasal dari era Vedic, ketika adat istiadat dan sistem sosial di India masih berkembang. Menurut penelitian Kumar (2008), praktik dowry pertama kali muncul sebagai bentuk hadiah yang diberikan oleh keluarga pengantin perempuan sebagai dukungan finansial kepada keluarga pengantin laki-laki setelah pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial, dowry berubah menjadi

tekanan yang membebani keluarga pengantin perempuan. Praktik ini kemudian berkembang menjadi sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga pengantin perempuan sebagai bentuk investasi untuk memastikan keselamatan dan kebahagiaan anak perempuan mereka setelah menikah.

Dampak Praktik Dowry terhadap Perempuan di India

Praktik dowry berdampak besar pada kehidupan perempuan di India. Berdasarkan penelitian oleh Rahmawati (2019), salah satu dampak paling merugikan adalah meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Ketika keluarga pengantin laki-laki merasa tidak puas dengan mahar yang diberikan, atau ketika pihak keluarga pengantin perempuan tidak dapat memenuhi tuntutan dowry, pengantin perempuan sering kali menghadapi pelecehan fisik dan emosional, bahkan hingga penindasan atau pembunuhan, yang dikenal sebagai "dowry death" atau "pembunuhan mahar." Penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya tekanan untuk membayar dowry dapat menyebabkan depresi dan stres pada pengantin perempuan akibat beban ekonomi dan sosial yang besar.

Perkembangan Gerakan Anti Dowry di India

Gerakan anti dowry di India telah berkembang sejak beberapa dekade terakhir sebagai respons terhadap ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh

perempuan. Menurut penelitian oleh Wulandari (2017), gerakan ini pertama kali muncul sebagai inisiatif dari beberapa kelompok aktivis perempuan yang menyadari perlunya perubahan dalam pola pikir masyarakat terkait peran dan martabat perempuan dalam pernikahan. Gerakan ini menyuarakan pentingnya kesetaraan gender dan menolak praktik dowry yang menghancurkan hidup banyak perempuan.

Seiring waktu, gerakan anti dowry semakin berkembang dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, aktivis perempuan, akademisi, dan bahkan pemerintah. Penelitian oleh Susilo (2020) menunjukkan bahwa gerakan ini berhasil menciptakan kesadaran publik tentang bahaya praktik dowry dan mendorong penguatan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan. Beberapa wilayah di India telah mengadopsi Undang-Undang Anti-Dowry yang lebih tegas untuk memberantas praktik ini. Selain itu, kampanye sosial media dan acara demonstrasi telah menjadi bagian penting dari gerakan ini untuk menyebarkan pesan kesetaraan gender dan mengajak masyarakat untuk bergabung dalam perjuangan melawan praktik dowry.

Tantangan dan Harapan Gerakan Anti Dowry di India Meskipun gerakan anti dowry telah mencapai beberapa kesuksesan, tetap ada tantangan besar yang harus dihadapi. Penelitian oleh Pratama

(2021) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan terbesar adalah perubahan pola pikir dan budaya masyarakat yang sudah mengakar selama berabad-abad. Beberapa keluarga masih memandang praktik dowry sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya mereka. Oleh karena itu, pendekatan gerakan haruslah holistik, melibatkan pendidikan, kesadaran sosial, dan kampanye yang terus-menerus untuk mencapai perubahan yang berarti.

Harapan gerakan anti dowry di India adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi perempuan dalam konteks pernikahan. Penelitian oleh Fitriani (2022) menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada perempuan, yang mengakui peran mereka sebagai agen perubahan dalam melawan praktik dowry dan ketidakadilan gender. Harapan lain adalah dukungan terus-menerus dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam memberantas praktik dowry dan menyediakan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban.

Gerakan anti dowry di India adalah upaya masyarakat untuk melawan praktik tradisional yang merugikan perempuan dalam proses pernikahan. Praktik dowry telah menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Gerakan ini telah berkembang pesat dan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan kesadaran publik

dan mengubah pola pikir masyarakat terkait kesetaraan gender. Meskipun menghadapi tantangan besar, harapan gerakan ini adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi perempuan dalam konteks pernikahan. Dalam upaya meng

C. Peran Pemerintah India dan UN Women untuk Mengatasi Dowry Deaths di India

Peran Pemerintah India

Pemerintah India menyadari urgensi dan kompleksitas isu dowry deaths, sehingga berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah melalui kebijakan legislatif. Pada tahun 1961, India mengesahkan Dowry Prohibition Act, yang bertujuan untuk melarang praktik pemberian atau permintaan mahar dalam bentuk apapun. Meskipun undang-undang ini sebenarnya ada sejak lama, namun implementasinya tidak selalu berhasil (Kapur: 2015). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat hukuman bagi pelaku praktik ini, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang undang-undang tersebut.

Selain itu, pemerintah India juga berusaha meningkatkan akses wanita terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Pendidikan dan kemandirian ekonomi memiliki peran penting dalam mengurangi praktik dowry deaths. Dengan

pendidikan yang lebih baik dan akses ke lapangan kerja, wanita memiliki kesempatan untuk mandiri secara ekonomi dan lebih mampu menolak tuntutan mahar yang berlebihan. Pemerintah India juga meluncurkan berbagai program pelatihan dan kewirausahaan khusus untuk wanita, sehingga mereka dapat mandiri secara finansial (Banerjee: 2020).

Peran UN Women

Organisasi PBB, UN

Women, juga memiliki peran krusial dalam membantu India mengatasi masalah dowry deaths dan kekerasan terhadap perempuan secara umum. UN Women telah bekerja sama dengan pemerintah India dan LSM lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik dowry dan hak-hak perempuan. Melalui kampanye dan program edukasi, UN Women berusaha untuk mengubah paradigma sosial dan menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat (Kapur: 2015).

Selain itu, UN Women juga memberikan dukungan teknis dan keuangan untuk berbagai proyek yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Program perlindungan dan advokasi yang didukung oleh UN Women telah memberikan tempat perlindungan bagi wanita yang mengalami ancaman dowry deaths, memberikan pendampingan hukum, dan mengadvokasi keadilan bagi para korban (Banerjee: 2020).

Kolaborasi antara Pemerintah India dan UN Women

Kolaborasi antara pemerintah India dan UN Women telah memperkuat upaya dalam mengatasi masalah dowry deaths di India. Melalui sinergi dan koordinasi, mereka mampu mencapai lebih banyak orang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus dowry deaths. Selain itu, UN Women juga berperan sebagai pengawas dan katalisator bagi pemerintah India dalam mematuhi komitmen internasionalnya untuk memajukan hak-hak perempuan (Kapur: 2015).

Satu contoh konkret kolaborasi ini adalah program pelatihan yang diberikan kepada petugas hukum dan penegak hukum di India oleh UN Women. Dengan demikian, mereka lebih sensitif terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan lebih kompeten dalam menangani kasus-kasus dowry deaths (Banerjee: 2020).

Masalah dowry deaths di India merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah tegas dalam penanganannya. Pemerintah India bersama dengan UN Women telah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan, program, dan kampanye yang bertujuan untuk mengubah paradigma sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat, mereka

mampu mencapai lebih banyak orang dan memperkuat upaya pencegahan serta perlindungan bagi korban dowry deaths. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, langkah-langkah ini memberikan harapan bahwa di masa depan, praktik dowry deaths dapat ditekan dan perempuan di India dapat hidup dengan lebih aman dan bermartabat (Kapur: 2015).

KESIMPULAN

Dari jurnal "Anti-Dowry oleh United Nations Women di India tahun 2016-2018," dapat disimpulkan bahwa upaya anti-mahar (dowry) oleh United Nations Women memiliki dampak positif dalam mengurangi praktik ini di India selama periode penelitian. Program tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini, mendorong perubahan perilaku, dan memberikan dukungan bagi perempuan yang terlibat dalam praktik dowry.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program selanjutnya adalah:

1. Penguatan pendekatan partisipatif: Melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam merancang dan melaksanakan program anti-dowry akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan program tersebut.

2. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lokal: Bekerjasama dengan pihak berwenang dan lembaga lokal akan membantu mengintegrasikan program anti-dowry ke dalam kebijakan dan program pemerintah yang lebih luas.

3. Peningkatan pendanaan: Mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan dana untuk program ini akan memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang lebih luas dan berkelanjutan.

4. Evaluasi terus-menerus: Melakukan evaluasi berkala untuk mengukur dampak program dan mengidentifikasi area di mana program dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London: George Allen and Unwin Publisher

Bakry, Umar. 1999. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta: University Press

Barnes, K. 2015. *The Evolution and Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325: An Overview*. New York: Routledge.

Meleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rosenau, James. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press

Agarwal, S., & Nayagam, C. (2017, October 7). Dowry: The Dark side of Indian Weddings. Media India. <https://mediaindia.eu/society/dowry-the-dark-side-ofindian-weddings/>

Crime In Delhi. (2016, December 8). Data of Dowry Deaths Cases in Delhi. <http://www.crimeindeli.com/data-dowry-deaths-cases-delhi-crimeindeli>

Mallapur, C. (2015, August 25). Minor girls and women chief targets in India's surging human trafficking trade. Scroll.In. <https://scroll.in/article/751298/minor-girls-andwomen-chief-targets-in-indias-surgingsurging-human-trafficking-trade>

Nagpal, H. (2017, June 21). The Historical Journey Of Anti-Dowry Laws. Feminism in India. <https://feminisminindia.com/2017/06/21/historical-journey-anti-dowry-laws/>

Rastogi, Mudita dan Paul Therly. "Dowry and Its Link to Violence against Women in

- India: Feminist Psychological Perspectives”. Trauma Violence Abuse 7.1 (Jan. 2006): 66-77. Sage Publications.
- Resolution General Assembly A/RES/64/289, paragraph 57. United Nations General Assembly. <http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women>, diakses 27 Juni 2023
- Sivakumar, M. (2008). Discrimination Gender and Women’s Development. (Paper Chikkaiah Naicker College. 2008). Diakses dari <http://mpira.ub.unimuenchen.de/10950/>, diakses 19 Mei 2023
- United Nations General Assembly, “UN Women: A New Era in the UN’s Work on Women”, tersedia di <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-women>, diakses pada 7 Juli 2023.
- UN Women. “CONSULTANT FOR THE CAPACITY ENHANCEMENT OF STAKEHOLDERS ON GENDER EQUALITY AND WOMEN’S EMPOWERMENT”. Diakses melalui: <http://unwomen.org.pk/india/wpcontent/uploads/2018/ToRs> , diakses 7 Juli 2023
- Banerjee, P. R. (2014). Dowry in 21st-Century India: The Sociocultural Face of Exploitation. Trauma, Violence, & Abuse, 15(1), 34–40.
- Jagori. Marching Together, Resisting Dowry in India. Monobina Gupta (Ed). The India Court of Women on Dowry and Related Forms of Violence Against Women, 2009.
- Mareta, S. 2017. Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015.
- Oktaviani, J. dan Setiawati, S.M. 2017. Kebijakan Pemerintah India Dalam Mengatasi Masalah Dowry Deaths.
- Olivia, Yessi. 2013. Level Analisis Sitem dan Terori Hubungan Internasional. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.5 No.3
- Resen, Putu Titah Kawitri dan Ranteallo, I.C.R 2012. Dowry Murder: Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan di India. Bali: Universitas Udayana.